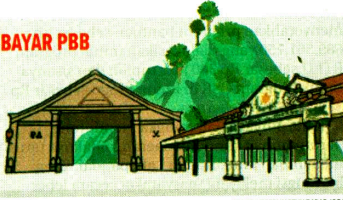




**BCB TETAP DITARIK MEMBAYAR PBB**

- Pada tahun ini target penerimaan PBB Rp 104 miliar.
- Terkait nominal besaran PBB yang harus dibayarkan, secara signifikan akan ikut mendongkrak pendapatan Pemkot Jogja.



GRAFIS: HESPIRI KARTUN/RADAR JOGJA

## Dikaji, Keraton dan Pakualaman Jadi Objek PBB

Untuk Memaksimalkan Pendapatan Daerah Kota Jogja

**JOGJA** - Untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak, anggota DPRD Kota Jogja mengusulkan Keraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman dimasukkan menjadi objek

pajak. Terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Selama ini Keraton maupun Kadipaten disebut dibebaskan dari kewajiban membayar PBB ■

Baca *Dikaji...* Hal 7

## Dikaji, Keraton dan Pakualaman Jadi Objek PBB

*Sambungan dari hal 1*

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kota Jogja Fokky Ardiyanto saat rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Balai Kota Jogja, Jumat (1/9) lalu. Sebelum diketok, legislator dari Fraksi PDIP itu mengajukan interupsi. "Saya minta dikaji agar pemkot mempertimbangkan keraton dan kadipaten jadi objek pajak," tuturnya saat dikonfirmasi kemarin (4/9). "Itu pun sudah menjadi catatan rapur yang disetujui semua fraksi."

Menurut dia, masukan itu sudah lama disuarakan tapi tidak diakomodasi. Termasuk dalam pembahasan raperda. Dia menyebut, selama ini Keraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman tidak dimasukkan menjadi objek pajak karena merupakan lembaga budaya yang tidak berorientasi pada profit. Itu juga yang ditulis dalam draf raperda pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf b, pengecualian diberikan pada, bumi dan/atau bangu-

nan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Fokky menilai meskipun keraton dan kadipaten memiliki fungsi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan tidak memperoleh keuntungan, biaya operasional sudah mencukupi. Karena mendapatkan dana hibah yang berasal dari dana keistimewaan. Belum lagi keraton dan kadipaten juga menarik retribusi bagi wisatawan yang datang. Dia pun membandingkan dengan bangunan cagar budaya (BCB) yang tetap ditarik membayar PBB meski bisa mengajukan keringanan.

"BCB itu lebih berat. Untuk perawatan biaya sendiri, tak boleh mengubah bentuk bangunan," ungkapnya.

Selain itu anggota Komisi B DPRD Kota Jogja itu juga membeberkan Keraton Jogja masih mendapatkan pendapatan lainnya seperti sewa Sultanaat Groond (SG) yang dipakai perkar-

tan. Dia mencontohkan Pasar Beringharjo, setiap tahunnya Pemkot Jogja juga menganggarkan biaya sewa yang disetorkan ke Keraton Jogja. "Tanah mageri yang dipakai masyarakat atau pemerintah itu kan juga tetap ada sewanya ke keraton," tuturnya.

Pada tahun ini target penerimaan PBB mencapai Rp 104 miliar. Terkait nominal besaran PBB yang harus dibayarkan, Fokky menyebut secara signifikan akan ikut mendongkrak pendapatan Pemkot Jogja. Terlebih melihat luasan lahan keraton maupun Pakualaman di Kota Jogja. "Ya keraton, Alun-Alun Utara dan Selatan, atau Alun-Alun Sewandanan Pakualaman itu kan sangat luas," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Wasesa enggan berkomentar terkait permintaan dari legislatif tersebut. Ditemui usai menghadiri rapur di Balai Kota Jogja, Senin (4/9), Wasesa hanya menjawab singkat, "Masih dikaji dulu." (**pra/laz/hep**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005